

Nomor : B-16/PM.00.02/K.JI-25/03/2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 (tiga) lembar  
Perihal : **Imbauan**

Situbondo. 9 Maret 2026

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Situbondo**  
di-

Tempat

## 1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

## 2. MEMPERHATIKAN

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

### 1. Pasal 5 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

Penyelenggara PDPB meliputi:

- 1) KPU.
- 2) KPU Provinsi.
- 3) KPU Kabupaten/Kota.

### 2. Pasal 8 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

#### 1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
2. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
3. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
4. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
5. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.

#### 2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB Tingkat kabupaten/kota.

#### 3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:

1. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
2. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
3. mengelola, mengamankan, dan menyajikan data pemilih berskala kabupaten/kota;
4. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
5. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
6. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

### 3. Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. pengolahan data;
2. koordinasi;

3. pemutakhiran; dan
4. rekapitulasi.

4. Pasal 16 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
- 2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;
  1. Bawaslu Kabupaten/Kota;
  2. Dinas yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
  3. Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara;
  4. Tentara Nasional Indonesia;
  5. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  6. Pemerintahan tingkat Kecamatan atau nama lain;
  7. Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain;
  8. Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain; dan/atau
  9. Instansi terkait lainnya.

5. Pasal 17 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

- 1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  1. menyandingkan data yang berasal dari:
    1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
    2. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
    3. laporan dari masyarakat.
- 2) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemilih dengan kriteria:
  1. meninggal dunia;
  2. pemilih ganda;
  3. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan
  4. belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;

5. pemilih pindah domisili;
  6. pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
  7. pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  8. warga negara asing; dan
  9. pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Pasal 20 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :
- 1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
  - 2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten/Kota.
  - 3) Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi disertai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.
  - 4) Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
  - 5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
    1. Bawaslu Kabupaten/Kota;
    2. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
    3. instansi terkait lainnya.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Situbondo telah melakukan Pengawasan dengan metode Uji Petik dan Koordinasi pada Bulan Februari 2026 dan tersebar di beberapa Desa se-Kabupaten Situbondo;
8. Berdasarkan Poin 7 terdapat beberapa fakta yang pada pokoknya terdapat banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masih terdaftar dalam data pemilih hasil Pleno Rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Situbondo Triwulan IV Tahun 2025, pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut sebagaimana terlampir;

9. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai pada poin 7, Bawaslu Kabupaten Situbondo menemukan Pemilih Baru yang belum terdaftar pada hasil Pleno Rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Situbondo Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

### **3. IMBAUAN**

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Situbondo mengimbau kepada KPU Kabupaten Situbondo pada PDPB Triwulan I Tahun 2026, untuk:

1. Memaksimalkan Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Triwulan I Tahun 2026;
2. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dan langkah-langkah pro-aktif terhadap Dasdiknas dan Kemenag untuk mengup-date secara maksimal data Pemilih Pemula yang baru memasuki usia 17 tahun atau sebelum 17 tahun tapi sudah menikah atau pernah menikah;
3. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan TNI-Polri untuk mengup-date Alih Status dari Sipil menjadi TNI-Polri atau TNI-Polri yang telah Purna Tugas;
4. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk mengup-date data Pemilih Pemula, Meninggal, Pindah Keluar dan Pindah Masuk.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,**



**Ahmad Faridl Ma'ruf**

#### **Tembusan:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran 1 Surat Imbauan  
Nomor : B-16/PM.00.02/K.JI-25/03/2026  
Tanggal : 9 Maret 2026

### DAFTAR PEMILIH TMS DAN PEMILIH BARU

| NO  | NAMA              | NIK        | ALAMAT                | DESA/KEL    | KECAMATAN | KETERANGAN |
|-----|-------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------|------------|
| 1.  | ABDIYA            | [REDACTED] | DUSUN ASTA            | ARJASA      | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 2.  | NAWARI            | [REDACTED] | DUSUN ASTA            | ARJASA      | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 3.  | DAHRANI/EMAT      | [REDACTED] | DUSUN KIWONDO         | ARJASA      | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 4.  | ISA               | [REDACTED] | DUSUN ASTA            | ARJASA      | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 5.  | WATIAH            | [REDACTED] | DUSUN WIRAKRAMA       | ARJASA      | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 6.  | MARJIA            | [REDACTED] | KP KRAJAN RT 01 RW 02 | BAYEMAN     | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 7.  | DULGANI           | [REDACTED] | KP KRAJAN RT 02 RW 02 | BAYEMAN     | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 8.  | DADARI            | [REDACTED] | KP DAWUAN RT 01 RW 01 | BAYEMAN     | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 9.  | SAMSIANI          | [REDACTED] | KP TAMAN REJO         | CURAH TATAL | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 10. | RUSNI             | [REDACTED] | COBBUK                | CURAH TATAL | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 11. | MANISA            | [REDACTED] | KP. MINDI             | CURAH TATAL | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 12. | FERA YANTI FAJRIN | [REDACTED] | KP TAMAN REJO         | CURAH TATAL | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 13. | ARSUYA            | [REDACTED] | KP. DAMPAS RT 2 RW 5  | JATISARI    | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 14. | SAHYAD            | [REDACTED] | KP. PAO RT 1 RW 4     | JATISARI    | ARJASA    | MENINGGAL  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO  | NAMA    | NIK        | ALAMAT                       | DESA/KEL | KECAMATAN | KETERANGAN |
|-----|---------|------------|------------------------------|----------|-----------|------------|
| 15. | JUMAIA  | ██████████ | KP CAMPALOK RT 4 RW 6        | JATISARI | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 16. | NAWIYAH | ██████████ | KP. CAMPALOK RT 1 RW 6       | JATISARI | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 17. | ETI     | ██████████ | KP. CAMPALOK RT 1 RW 7       | JATISARI | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 18. | MISRAN  | ██████████ | KP. CAMPALOK RT 1 RW 6       | JATISARI | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 19. | MUGIMIN | ██████████ | KP CAMPALOK RT 4 RW 6        | JATISARI | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 20. | SALAMA  | ██████████ | KP CAMPALOK RT 4 RW 6        | JATISARI | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 21. | BUYA    | ██████████ | KP. PAO RT 3 RW 4            | JATISARI | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 22. | TOHAT   | ██████████ | KP. SAPODI RT 2 RW 2         | JATISARI | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 23. | BUYA    | ██████████ | KP. PAO RT 2 RW 4            | JATISARI | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 24. | SATIMA  | ██████████ | KP. PAO RT 3 RW 4            | JATISARI | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 25. | MANI    | ██████████ | KP KRAJAN                    | JATISARI | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 26. | AHWENI  | ██████████ | KP. DAMPAS RT 1 RW 5         | JATISARI | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 27. | MISNAMI | ██████████ | KP KRAJAN RT 2 RW 1          | JATISARI | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 28. | MAKNIYA | ██████████ | KP. SAPODI RT 1 RW 2         | JATISARI | ARJASA    | MENINGGAL  |
| 29. | HAPIYA  |            | KP KARANG SUKUN RT 01 RW 04  | SUBOH    | SUBOH     | MENINGGAL  |
| 30. | MISJAN  |            | KP KARANG SUKUN RT 01 RW 04  | SUBOH    | SUBOH     | MENINGGAL  |
| 31. | MOHTAR  |            | KP KARANG SUKUN RT 01 RW 04  | SUBOH    | SUBOH     | MENINGGAL  |
| 32. | SANA    |            | KP KARANG SUKUN RT 01 RW 04  | SUBOH    | SUBOH     | MENINGGAL  |
| 33. | MARITO  |            | KP. KEMBANG SUKO RT 04 RW 01 | SUBOH    | SUBOH     | MENINGGAL  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO  | NAMA                            | NIK        | ALAMAT                       | DESA/KEL   | KECAMATAN | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------|------------|------------------------------|------------|-----------|------------|
| 34. | SALEH                           | ██████████ | KP. KRAJAN RT 02 RW 01       | JANGKAR    | JANGKAR   | MENINGGAL  |
| 35. | MA'A                            | ██████████ | KP. KRAJAN RT 03 RW 02       | JANGKAR    | JANGKAR   | MENINGGAL  |
| 36. | MURSIA                          | ██████████ | KP. KRAJAN RT 03 RW 01       | JANGKAR    | JANGKAR   | MENINGGAL  |
| 37. | RUSLAN ABDUL GANI               | ██████████ | KP. KRAJAN RT 03 RW 01       | JANGKAR    | JANGKAR   | MENINGGAL  |
| 38. | SUPARMAN                        | ██████████ | KP. KRAJAN RT 01 RW 03       | JANGKAR    | JANGKAR   | MENINGGAL  |
| 39. | FARIDA                          | ██████████ | KP. PASAR NANGKA RT 01 RW 03 | JANGKAR    | JANGKAR   | MENINGGAL  |
| 40. | IMAM                            | ██████████ | KP. PASAR NANGKA RT 01 RW 01 | JANGKAR    | JANGKAR   | MENINGGAL  |
| 41. | MAHWANI                         | ██████████ | KP. PASAR NANGKA RT 03 RW 01 | JANGKAR    | JANGKAR   | MENINGGAL  |
| 42. | MUSTA'IN ROBI                   | ██████████ | TALKANDANG BARAT RT.4 RW.4   | TALKANDANG | SITUBONDO | TNI        |
| 43. | RASYA ADITYA<br>ALFRENDI        | ██████████ | LUGUNDANG TIMUR RT.1 RW.5    | TALKANDANG | SITUBONDO | TNI        |
| 44. | ARTIKA PRATIWI                  | ██████████ | KP. KRAJANRT 01 RW 03        | JANGKAR    | JANGKAR   | BARU       |
| 45. | AKBAR PRATAMA<br>WIRA ATMAJA    | ██████████ | KP. PASAR NANGKA RT 01 RW 03 | JANGKAR    | JANGKAR   | BARU       |
| 46. | ADRIAN RAMADHANI<br>SEPTIANSYAH | ██████████ | KP. KRAJAN RT 02 RW 03       | JANGKAR    | JANGKAR   | BARU       |
| 47. | ACHMAD RIYAN<br>AYDIL SALIM     | ██████████ | KP. PASAR NANGKA RT 02 RW 03 | JANGKAR    | JANGKAR   | BARU       |
| 48. | ELIZAH ZAHRO                    | ██████████ | KP. PASAR NANGKA RT 02 RW 04 | JANGKAR    | JANGKAR   | BARU       |
| 49. | NAYZILA AULIA                   | ██████████ | KP. PASAR NANGKA RT 02 RW 04 | JANGKAR    | JANGKAR   | BARU       |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).